

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DAFTAR PILUN DIT RESKRIMSUS POLDA NTB TAHUN 2017

NO.	NAMA	TAHUN	KET
1	2	3	4
1.	KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	2006	
2.	LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NO 15 TAHUN 2007 TENTANG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2007	
3.	PERATURAN KAPOLRI NO 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN POS	2007	
4.	PERATURAN KAPOLRI NO 3 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM OPERASIONAL POLRI	2009	
5.	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1, 2 DAN 3 TAHUN 2003	2009	
6.	PENYERAGAMAN FORMAT DAN PENOMORAN LAPORAN POLISI	2010	
7.	HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PPNS DALAM PENEGAKKAN HUKUM (PERDA) DI WILAYAH NTB	2010	
8.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	2010	
9.	INSTRUKSI KERJA	2010	
10.	INSTRUKSI KERJA	2010	
11.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR : KEP/313/V/2010 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP POLRI	2010	

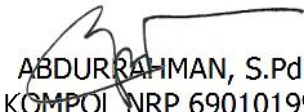
1	2	3	4
12.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR: KEP/314/V/2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN POLRI	2010	
13.	SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/706/VIII/2010 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN POLRI	2010	
14.	PEDOMAN PELAPORAN BARANG BUKTI YANG BERNILAI EKONOMIS YANG DISITA OLEH PENYIDIK	2010	
15.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN POLRI	2011	
16.	KESEPAKATAN PENEGAK HUKUM CRIMINAL JUSTICE SISTEM DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI	2011	
17.	PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIT PAMOBVIT POLDA NTB	2011	
18.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (REVISI)	2011	
19.	STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (REVISI)	2011	
20.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN	2011	
21.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI POLRI DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA	2011	

1	2	3	4
22.	SOP TENTANG KEIKUTSERTAAN BID PROPAM POLDA NTB DALAM MENANGANI UNJUK RASA DAMAI ANARKI ANTI KEKERASAN DI POLDA NTB	2012	
23.	PEDOMAN MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN REFRESHING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BIROKRASI POLRI	2012	
24.	LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ASSESMENT CENTER DI LINGKUNGAN POLRI	2012	
25.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI	2012	
26.	PERATURAN KAPOLDA NTB NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KEMERDEKAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAMAI – ANARKISTIS ANTI KEKERASAN	2012	
27.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN DI LINGKUNGAN POLRI	2012	
28.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS POLRI	2012	
29.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN POLRI	2012	
30.	PENYEMPURNAAN PERKAP NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK	2012	

1	2	3	4
31.	PERATURAN KAPOLDA NTB NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN POLRI	2013	
32.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 32/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013	2013	
33.	PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-12/PB/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVISI ANGGARAN YANG MENJADI BIDANG TUGAS DIRJEN PERBENDAHARAAN TAHUN ANGGARAN 2013	2013	
34.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN DI LINGKUNGAN POLRI	2013	
35.	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN POLRI	2013	
36.	SKEP KAPOLRI NO.POL: SKEP/702/IX/2005 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS POLRI DAN PNS	2013	
37.	STANDAR BIAYA MASUKAN 2014	2014	
38.	SOP TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN DIT TAHTI POLDA NTB	2014	
39.	BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMKA) PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	2014	

1	2	3	4
40.	PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SOP PERENCANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	2014	
41.	PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SOP PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	2014	
42.	PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SOP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	2014	
43.	PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SOP PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	2014	
44.	PERATURAN MEN PAN DAN RB RI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	2014	
45.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015	2014	
46.	SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/697/III/2015 TANGGAL 31 MARET 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI DAN MENGHINDARI ADANYA TEMUAN BERULANG BPK RI ATAS PEMANFAATAN ASET POLRI	2015	

Mataram, 7 April 2015  
a.n DIR RESKRIMSUS POLDA NTB  
KASUBBAG RENMIN

  
ABDURRAHMAN, S.Pd  
KOMPOL NRP 69010199